



**DAMPAK PEMBANGUNAN VILA DI KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN
BADUNG**

Oleh
I Putu Budiarta
Dosen Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan vila terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan vila di Kecamatan Kuta Utara dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, tetapi memberikan beberapa dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat dan lingkungan Kecamatan Kuta Utara. Secara ekonomi, pembangunan vila dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, membuka lapangan pekerjaan seperti bekerja di *home stay*, penyewaan papan selancar, panti pijat (*massage*) dan pedagang acung. Dampak sosial budayanya adalah dapat menurunkan tingkat kegotongroyongan masyarakat, terjadi degradasi budaya, harga tanah menjadi mahal, gangguan sosial, penyebaran obat terlarang, dan perdagangan sex. Dampak lingkungannya meliputi alih fungsi lahan pertanian, abrasi pantai, polusi air, banjir, serta limbah dan sampah. Berdasarkan penelitian ini direkomendasikan kepada seluruh sektor pariwisata di Kabupaten Badung mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata supaya pariwisata dapat berkelanjutan.

Kata Kunci: pembangunan, vila, kecamatan Kuta Utara.

PENDAHULUAN

Pariwisata di Kabupaten Badung terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Ketika kawasan Kuta sudah mulai penuh, pariwisata berkembang ke utara yaitu Desa Seminyak, kemudian ke Desa Kerobokan dan Canggu, yang ditandai dengan pembangunan vila bagaikan jamur di musim hujan yang jumlahnya semakin hari semakin banyak.

Keberadaan vila yang menjadi suatu fenomena dalam industri pariwisata di Kabupaten Badung secara tidak langsung telah memberikan nilai lebih terutama dalam bidang sarana akomodasi pariwisata yang merupakan salah satu komponen penting bagi perkembangan daerah tujuan wisata. Dengan tersedianya berbagai pilihan sarana akomodasi pariwisata maka akan dapat menarik minat

wisatawan dari berbagai segmen pasar untuk berkunjung ke Kabupaten Badung.

Data mengenai keberadaan vila di Kabupaten Badung baru diketahui pada tahun 2006 yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan tim *Tourism Field Study (TFS)* Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim tersebut diketahui bahwa jumlah vila di Kabupaten Badung mencapai 642 buah. Pola pemanfaatan dari vila tersebut adalah (1) bersifat komersil sebanyak 345 buah atau 53,7% ; (2) bersifat pribadi dan komersil sebanyak 137 buah atau 21,4%; dan (3) bersifat pribadi sebanyak 160 buah atau 24,9% (*Tourism Field Study*, 2006). Pembangunan vila di Kabupaten Badung paling banyak terdapat di Kecamatan Kuta Utara dibandingkan empat kecamatan lainnya.



Kecamatan Kuta Utara yang merupakan salah satu dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Badung yang memiliki luas wilayah 33,86 km² (8,10%) dari luas Kabupaten Badung. Kecamatan Kuta Utara terbagi atas enam desa/kelurahan yang meliputi Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan Klod, Desa Canggal, Desa Dalung dan Desa Tibubeneng. Luas Kecamatan Kuta Utara memiliki keterbatasan daya dukung baik daya dukung fisik maupun daya dukung lingkungan, karena itu pengembangan pariwisata di daerah tersebut harus dikaji secara seksama agar pariwisata dapat berkelanjutan. (Mardani, 2003:65).

Menurut Janianton Damanik (2002:70 dalam Sirtha 2005:5), sektor pariwisata sangat berfungsi untuk menekan laju pengangguran, dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) dalam penciptaan kesempatan kerja. Pekerjaan langsung yang tercipta dari pembangunan infrastruktur, seperti hotel, restoran, sarana rekreasi, kerajinan tangan dan fasilitas lainnya. Secara tidak langsung infrastruktur itu juga dapat menciptakan peluang kerja lain seperti pedagang sayur dan daging, sopir angkot, jasa *laundry* dan sebagainya. Semakin berkembang industri pariwisata maka semakin tinggi variasi pekerjaan yang diciptakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan vila terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan Kecamatan Kuta Utara. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terutama kepada masyarakat lokal, para pengambil keputusan dan kebijakan seperti Bappeda, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, investor, dan *stakeholders* pariwisata yang ikut terlibat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Badung pada khususnya dan Bali pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan karena Kecamatan Kuta

Utara memiliki jumlah vila paling banyak diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Badung dan maraknya pembangunan vila di wilayah tersebut ditengarai telah menimbulkan dampak terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka serta dapat dihitung, seperti jumlah sarana akomodasi dan vila yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara. Data kualitatif adalah data yang berupa keterangan-keterangan dan tidak dapat diangkakan atau tidak dapat diukur seperti kondisi perkembangan vila, potensi ekologis dan sosial budaya Kecamatan Kuta Utara.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan informan atau responden yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penentuan informan adalah metode *purposive sampling technique* yaitu cara penentuan informan dilakukan dengan sengaja berdasarkan tujuan dan maksud tertentu agar keterangan yang diperoleh dapat lebih dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2003).

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan narasi dan makna terhadap data dan informasi kualitatif sehingga mampu memberikan gambaran atau diskripsi mengenai fenomena dampak pembangunan vila terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan Kecamatan Kuta Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Marpaung (2001) vila adalah suatu usaha yang dikelola dengan menyediakan jasa pelayanan serta kamar untuk tidur bagi pejalan yang mampu membayar pantas sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan dengan



membuat perjanjian khusus. Sedangkan tim *Tourism Field Study STP Nusa Dua Bali* (2006) mengemukakan vila adalah rumah di luar kota yang merupakan sarana akomodasi yang dapat digunakan untuk pribadi maupun disewakan kepada wisatawan yang mampu membayar pantas sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, vila adalah jenis akomodasi yang terdiri dari satu atau lebih unit bangunan yang berdiri sendiri yang menyediakan jasa penginapan dan jasa lainnya dengan mengutamakan privasi dan pelayanan yang dikelola secara profesional dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan vila di Kecamatan Kuta Utara telah menimbulkan dampak terhadap ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Dampak tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

Dampak ekonomi

Secara ekonomi pertumbuhan dan perkembangan vila di Kecamatan Kuta Utara telah memberikan pengaruh yang positif terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kuta Utara yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dampak ekonomi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Pembangunan villa di Kuta Utara dapat menampung sebagian besar para pencari kerja di wilayah tersebut. Dari 62.481 orang penduduk Kuta Utara sebagian besar berprofesi sebagai pedagang (21 %), pengusaha sedang dan besar (6 %), buruh industri (2 %), pengangkutan (1,86 %), pengerajin industri kecil (2,50 %). Mereka pada umumnya bekerja di bidang pariwisata dan non-pariwisata seperti usaha vila, restoran, *laundry*, taman rekreasi, transportasi, penyewaan papan selancar, menjual makanan dan minuman, pedagang acung, tukang kebun dan *security* (Satpam). Dengan demikian

otomatis pariwisata dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kuta Utara.

Dengan adanya vila di Kuta Utara secara tidak langsung masyarakat setempat dapat menikmati kue pariwisata Bali yaitu dengan membuat usaha *homestay* yang disewakan kepada wisatawan. Sesuai dengan pengamatan di lapangan dampak ekonomi pariwisata tidak saja membuka lapangan pekerjaan bagi pengelola *home stay* dan penyedia rumah kost tetapi juga membawa efek ganda (*multiplier effect*) terhadap sektor lain seperti usaha penyedia sarana rekreasi, usaha jasa pertamanan, bussiness waralaba, pasar tradisional, usaha penyewaan mobil dan motor, usaha *money changer*, *beauty salon and spa*, serta rumah sakit yang memberikan jasa medis kepada wisatawan.

Dampak sosial budaya

Perkembangan pariwisata di Kecamatan Kuta Utara membawa dampak terhadap sosial budaya masyarakat setempat. Dampak tersebut dapat terlihat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kuta Utara sebagai berikut:

a) Gotong royong

Bagi masyarakat Kuta Utara, tradisi gotong royong sudah dilakukan secara turun temurun sejak jaman dahulu. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat kegiatan yang memerlukan tenaga manusia banyak seperti saat menanam padi di sawah, membangun pondasi rumah, membangun *bale banjar*, membangun dan memperbaiki tempat suci, membuat sesajen pada saat upacara di pura atau di *banjar*.

Setelah pariwisata berkembang, sangat jarang dijumpai kegiatan gotong royong di Kecamatan Kuta Utara. Saat membangun rumah, mereka lebih cenderung memborongkan atau mengupahkan pekerjaan itu kepada orang lain. Pada saat pembuatan sesajen untuk kegiatan upacara, mereka lebih suka membeli sesajen kepada pedagang *banten* (sesajen) yang banyak dijumpai di pasar



dikarenakan kurangnya waktu untuk membuat sesajen.

Dengan kebiasaan membeli sesajen berarti lama kelamaan makin sedikit orang Bali yang bisa membuat sesajen sehingga makin sedikit pula generasi penerus budaya Bali. Hal tersebut tentu akan berpengaruh negatif baik terhadap budaya maupun pariwisata Bali.

b) Organisasi *subak*

Subak merupakan organisasi petanian dalam hal pengairan yang anggotanya merupakan pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber atau bendungan tertentu. *Subak* memiliki hak otonom untuk mengatur diri secara luas, dengan tujuan menjamin pembagian air yang merata untuk mengangkat kesejahteraan para anggotanya. Namun dengan pertumbuhan pembangunan vila di Kecamatan Kuta Utara jumlah *subak* dan anggotanya makin lama makin sedikit. Dengan semakin sedikit organisasi *subak* yang ada maka makin sedikit pula organisasi yang peduli terhadap kelancaran dan kebersihan saluran irigasi sehingga masalah banjir menjadi langganan wilayah Kecamatan Kuta Utara.

c) Mata pencaharian penduduk

Kecamatan Kuta Utara terkenal sebagai desa pertanian dan desa nelayan yang memiliki banyak *sekaa* (kelompok kerja) seperti *sekaa jukung* (kelompok nelayan), *sekaa manyi* (kelompok tukang panen padi), *sekaa banten* (kelompok tukang bikin sesajen), *sekaa tumbeg* (kelompok tukang cangkul), *sekaa mula* (kelompok tukang tanam padi) dan sebagainya. Namun setelah pariwisata berkembang pesat di Kuta Utara, berangsur-angsur *sekaa* itu makin sedikit jumlahnya dan mendorong para anggotanya untuk beralih profesi dari petani dan nelayan ke profesi bidang pariwisata. Bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pariwisata hal ini tentu dapat menimbulkan konflik sehingga banyak dari mereka menjadi pengangguran dan menjual lahan pertaniannya.

d) Peran perempuan

Pada masa masyarakat agraris, kaum perempuan Kuta Utara bekerja di sektor domestik yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan menjaga anak di rumah, sedangkan sektor publik didominasi oleh kaum laki-laki. Namun di era pariwisata sekarang ini kaum perempuan Kuta Utara banyak yang bekerja di sektor publik seperti di hotel, restoran, toko cendera mata, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh sektor pariwisata yang telah mengakibatkan kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi, juga menuntut tenaga-tenaga kerja yang terampil baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian akan berdampak terhadap tuntutan pendidikan yang lebih tinggi baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mengantarkan kedudukan kaum perempuan dengan laki-laki semakin setara.

e) Pemakaian simbol-simbol agama

Kuta Utara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Hindu memiliki banyak benda-benda atau simbol-simbol yang sakral yang dipakai di pura dan saat upacara keagamaan seperti *pratima* (simbul Tuhan) yang dibuat dari uang kepeng dari Cina dan ada dari emas. Patung-patung sebagai manifestasi Tuhan tersebut ada yang sudah berumur ratusan tahun baik yang terbuat dari kayu maupun dari batu yang banyak dijumpai di setiap pura atau tempat suci yang ada di Bali. Pada saat upacara agama tempat suci dihiasi dengan sarana upacara seperti *payung*, *penjor*, *celontek* (sejenis umbul-umbul), serta *ider-ider* (sejenis bendera). Semenjak perkembangan pariwisata di Kuta Utara banyak vila dan restoran yang menggunakan benda-benda sakral tersebut sebagai dekorasi. Hampir di setiap restoran terpancang *penjor*, *celontek*, *payung* dan patung di pintu masuk restoran yang menyerupai suasana upacara di pura. Hal ini tentu akan dapat mengurangi nilai kesakralan benda-benda tersebut serta merta mengaburkan benda yang asli dengan yang tiruan.

f) Harga tanah menjadi mahal

Dengan pertumbuhan vila mengakibatkan harga tanah di Kuta Utara



semakin mahal. Keadaan ini dapat menjadi perangsang bagi sejumlah petani untuk menjual tanahnya kepada investor. Karena dengan menjual tanah, petani bisa mendapatkan hasil yang sangat tinggi dibandingkan dengan hasil bekerja di sawah yang jauh lebih sedikit. Lama kelamaan masyarakat Kuta Utara akan banyak yang tidak memiliki tanah sehingga anak cucu mereka menjadi miskin.

g) Kerawanan sosial

Ditinjau dari aspek sosial, Kuta Utara telah menjadi suatu kawasan yang rawan. Sering terjadi pencurian, penjambretan serta perampokan terhadap wisatawan yang tinggal di vila. Masalah sosial lainnya yaitu sering terjadi benturan-benturan antara pelaku pariwisata, adanya pemogokan kerja, demonstrasi, oleh para pelaku pariwisata yang merasa tidak puas di tempat mereka bekerja.

Dampak lingkungan

Perkembangan vila di Kecamatan Kuta Utara telah membawa dampak terhadap lingkungan Kuta Utara seperti berikut.

a. Alih fungsi lahan pertanian

Dengan pesatnya perkembangan pariwisata di Kecamatan Kuta Utara mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas penunjang pariwisata seperti vila, hotel, perumahan, pasar modern, dan lain-lain. Secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Kuta Utara pada tahun 2007 adalah 6.451 hektar, yang terdiri dari lahan pertanian/basah 3.030 hektar dan lahan kering 3.421 hektar. Berdasarkan Monografi Kecamatan Kuta Utara Tahun 2010 luas lahan pertanian adalah 3.008 hektar, yang berarti lahan pertanian telah mengalami penyusutan dan berubah menjadi fasilitas penunjang pariwisata seluas 22 hektar dalam waktu tiga tahun. Dari 22 hektar tersebut sebagian besar sudah dibangun vila dan sebagian ada yang belum difungsikan sehingga terkesan sebagai lahan tidur.

b. Lahan tidur

Banyaknya lahan yang belum dibangun vila oleh para investor menyebabkan banyak terdapat lahan tidur di Kecamatan Kuta Utara. Lahan tidur tersebut banyak dimanfaatkan sebagai tempat menggembala ternak bagi para petani setempat dan sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga sehingga lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Kotoran-kotoran ternak yang berserakan di sela-sela vila dan perumahan penduduk tersebut sangat mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan Kuta Utara. Lahan tidur tersebut tersebar di beberapa wilayah Kuta Utara seperti Desa Tibubeneng dan Canggung.

c. Pencemaran air

Pembangunan vila dan perumahan di Kuta Utara telah menyebabkan tingkat pencemaran air yang sangat tinggi. Sekitar tahun 2000-an air sungai masih bersih dan bisa digunakan sebagai tempat mandi oleh warga setempat. Namun akibat pembuangan limbah dari perumahan dan vila ke sungai mengakibatkan sungai menjadi kotor dan tidak layak dipakai mandi. Selain mencemari sungai, sampah-sampah perumahan juga akhirnya mencemari pantai di Kuta Utara sehingga dapat mengurangi keindahan panorama pantai di Kuta Utara. Sandi Adnyana (2007:17) mengungkapkan bahwa kandungan nitrit Pantai Canggung dan Peti Tenget berkisar antara 0,001-0,015 ppm yang berarti telah melebihi baku mutu.

d. Banjir

Semakin sedikitnya lahan pertanian di Kuta Utara menyebabkan semakin berkurangnya lahan serapan di wilayah tersebut. Kerusakan daerah serapan air yang tidak tertangani dengan baik menyebabkan kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Hal ini menyebabkan wilayah Kuta Utara setiap tahun tidak pernah absen dari banjir. Hal ini disebabkan oleh air hujan yang tidak terserap karena permukaan tanah telah dipenuhi dengan bangunan-



bangunan yang bersemen dan berbeton. Wilayah-wilayah langganan banjir di Kuta Utara meliputi Desa Kerobokan, perumahan Cangu Permai dan Dalung Permai. Akibat banjir aktivitas warga menjadi terhambat.

e. Abrasi pantai

Akibat pengaruh alam (arus dan gelombang) serta banjir dari hulu sungai telah menyebabkan erosi pantai yang cukup memprihatinkan. Pasir pantai hanyut dibawa ke tengah laut, dan lama kelamaan permukaan pantai menjadi makin curam serta mengikis lahan pertanian di sekitarnya. Selain faktor alam, intervensi manusia yang tidak memberi ruang yang cukup terhadap keseimbangan proses-proses dinamis di pantai serta aktivitas lainnya yang merubah pola arus dan gelombang telah menyebabkan kemunduran garis pantai. Hal ini tentu sangat mengancam keberadaan berbagai infrastruktur, bangunan dan lahan pertanian di pinggir pantai Kuta Utara.

f. Sampah dan limbah

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam dan barang-barang konsumsi lainnya untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam pemenuhan atas barang-barang konsumsi tersebut, sikap dan tanggung jawab masyarakat masih belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan. Tingginya penggunaan kemasan kantong plastik dan kaleng yang bersifat *undegradable* (tidak terurai oleh alam) dibuang ke lingkungan begitu saja tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi. Di lain pihak, sistem penanganan dan pengelolaan sampah dan limbah belum mengalami kemajuan yang berarti, sehingga volume sampah terus mengalami peningkatan.

g. Pelanggaran sempadan pantai

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan sebuah restoran yang berlokasi di kawasan Pantai Petitenget yang telah dirobohkan oleh Satpol PP Kabupaten Badung karena belum mengantongi ijin prinsip dan jaraknya hanya 10 meter dari bibir pantai. Ada juga beberapa hotel di Pantai Berawa yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari garis

pantai, namun masyarakat Desa Adat Berawa mendukung keberadaan hotel tersebut dengan alasan bisa menampung tenaga kerja lokal yang cukup banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Bendesa Adat Desa Berawa, I Wayan Warsa, mengatakan hotel tersebut merupakan hotel pertama yang berdiri di wilayah Desa Tibubeneng yang menjadi cikal bakal berkembangnya pariwisata di Kawasan Kuta Utara. Selain itu keberadaannya tidak mengganggu kegiatan prosesi ritual keagamaan masyarakat (Hasil wawancara tanggal 2 September 2013).

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi A dan B DPRD Badung pada tanggal 2 November 2013 menemukan lima unit restoran dan dua unit hotel di kawasan Pantai Batu Belig yang melanggar sempadan pantai. Bangunan tersebut adalah restoran Batu Belig Beach Club, La Barca, Cozy Beach, Warung Pantai, dan Cantina. Ketua Komisi B DPRD Badung, Putu Parwata menegaskan bangunan-bangunan tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang RTRW Badung. Sempadan pantai di Kelurahan Batu Belig diatur sepanjang 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan bangunan-bangunan tersebut hanya berjarak sekitar 25 meter dari titik pasang.

h. Pelanggaran terhadap bangunan suci

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Bisama Kesucian Pura oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Tahun 1994, ditetapkan mengenai ketentuan pembangunan di sekitar tempat suci sesuai dengan jenis tempat suci tersebut. Pura Sad Khayangan radiusnya adalah 5000 meter dari batas luar penyengker pura, Pura Khayangan Jagat 2000 meter dari batas luar penyengker pura dan Khayangan Tiga adalah *apenimpug* (sejauh kekuatan tangan melempar) dan disesuaikan dengan hasil *perareman* (kesepakatan) dan *awig-awig* (peraturan) desa pakraman setempat.



Bangunan vila yang melanggar ketentuan pembangunan yaitu jaraknya hanya 5 meter dari Pura Dalem Perancak Desa Tibubeneng, tetapi karena tanah yang digunakan adalah merupakan tanah *labe* (milik) pura setempat yang dikontraskan kepada investor, maka masyarakat tidak mempermasalahkan keberadaan vila tersebut, termasuk juga pemerintah Kabupaten Badung akhirnya memberikan rekomendasi dan memperbolehkan berdirinya bangunan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Dampak pembangunan vila di Kecamatan Kuta Utara ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dari segi ekonomi pembangunan vila di Kecamatan Kuta Utara membawa dampak yang positif karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha seperti *homestay*, sarana rekreasi, usaha jasa pertamanan, bisnis waralaba, pasar-pasar tradisional, usaha penyewaan mobil dan motor, *money changer*, *beauty salon and spa*, serta usaha rumah sakit. Dari segi sosial budaya, pembangunan vila di Kecamatan Kuta Utara menimbulkan kriminalitas seperti pencopetan, perampokan, dan peredaran obat terlarang. Dampaknya terhadap lingkungan, pembangunan vila di Kecamatan Kuta Utara mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian, pencemaran, abrasi pantai, banjir, sampah dan limbah, lahan tidur, pelanggaran terhadap sempadan pantai dan bangunan tempat suci.

Saran

Dampak-dampak negatif pembangunan villa di Kuta Utara perlu diminimalisir dengan melakukan upaya-upaya pembebasan pajak PBB kepada para petani di Kecamatan Kuta Utara sehingga masyarakat tidak berkeinginan untuk menjual tanahnya. Pemerintah mengeluarkan RTRW dan peraturan yang menyangkut pembangunan pariwisata di Kuta Utara serta menegakkan hukum dan peraturan

secara tegas. Desa Pakraman berperan aktif dalam melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat dengan cara melarang menjual tanah, dan masyarakat ikut menjaga dan meningkatkan sistem keamanan lingkungan supaya wisatawan merasa aman tinggal di Kecamatan Kuta Utara. Para pemilik vila seyogyanya ikut melakukan penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kuta Utara dengan menanam pohon. Masyarakat Kuta Utara perlu ditingkatkan pendidikan dan keterampilannya di bidang pariwisata melalui jalur formal dan informal agar tidak kalah bersaing dengan para pencari kerja dari luar Kuta Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim. 2007. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan Desertasi. Denpasar: Universitas Udayana.
- [2] Mardani, N.K. ----- . "Daya Dukung Lingkungan Fisik dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan di Bali" dalam Ardika, I Wayan. 2003. Pariwisata Budaya Berkelanjutan Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global. Denpasar: Universitas Udayana.
- [3] Marpaung, H. 2001. Pengetahuan Kepariwisata. Bandung : Alfabeta.
- [4] Monografi Kecamatan Kuta Utara Tahun 2011.
- [5] Pitana, I G & Putu G. Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi
- [6] Sandi Adnyana, I Wayan dan Suarna, I Wayan. ----- . "Permasalahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup" dalam Dalem, A.A.G.R. 2007. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Denpasar: Universitas Udayana
- [7] Sirtha, I Nyoman. 2005. "Kebijakan Pembangunan Pariwisata Sebagai Program Unggulan" dalam Majalah Ilmiah Pariwisata. No. 01/Th. I/Juni/2005. Denpasar: Universitas Udayana.



-
- [8] Sugiyono., 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- [9] Tim Tourism Field Study. 2006. Eksistensi dan Esensi Vila dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Badung. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.